

**ANALISIS KINERJA EKONOMI DAN DETERMINAN KETIMPANGAN  
PENDAPATAN DI INDONESIA PERIODE 1983-2022**

***ANALYSIS OF ECONOMIC PERFORMANCE AND DETERMINANTS OF INCOME  
INEQUALITY IN INDONESIA FOR THE PERIOD 1983-2022***

**Dudi Septiadi<sup>1\*</sup>, Annisa Fitri<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram, Jl. Majapahit, No. 62  
Kota Mataram, Indonesia.

<sup>2</sup>Program Studi Agribisnis Pangan, Politeknik Negeri Lampung, Jl. Soekarno Hatta No 10,  
Kota Bandar Lampung, Indonesia

\*Email penulis korespondensi: [dudi@unram.ac.id](mailto:dudi@unram.ac.id)

**ABSTRAK**

Ketimpangan merupakan masalah krusial yang harus segera diselesaikan. Ketimpangan pendapatan memiliki dampak negatif yang luas bagi masyarakat. Diantaranya adalah masyarakat miskin tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, sehingga kesejahteraan mereka menurun. Selain itu, ketimpangan juga memunculkan kecemburuan sosial dan mendorong terjadinya konflik sosial. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk; 1) menganalisis kinerja ekonomi Indonesia periode 1983-2022; 2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia periode 1983-2022. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data time series dari tahun 1983-2022 (40 pengamatan). Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja ekonomi dari aspek pertumbuhan ekonomi paling baik dicapai oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan tingkat ketimpangan pendapatan terendah dicapai oleh pemerintah Presiden Habibi, Abdurrahman Wahid, dan Megawati. Tingkat inflasi tertinggi terjadi di masa orde baru, sedangkan pemerintahan paling baik dalam mengendalikan inflasi adalah pemerintahan Jokowi. Penurunan jumlah penduduk miskin paling tinggi terjadi pada pemerintah Presiden Habibi, Abdurrahman Wahid, dan Megawati. Dimana rata-rata tingkat penurunan jumlah penduduk miskin pada periode 1999-2004 sebesar 5,21 % per tahun. Sedangkan tingkat penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia paling rendah terjadi pada Pemerintahan Jokowi. Faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia adalah variabel pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, harga BBM bersubsidi, harga beras eceran (tingkat konsumen) dan rezim pemerintahan (variabel dummy).

Kata Kunci : disparitas, ketimpangan ekonomi, perubahan, kemiskinan.

**ABSTRACT**

Inequality is a crucial problem that must be resolved immediately. Income inequality has a broad negative impact on society. Among them is that poor people cannot fulfill their basic needs, so their welfare decreases. Apart from that, inequality also gives rise to social jealousy and encourages social conflict. This research is a type of quantitative research. The aim of this research is to; 1) analyze Indonesia's economic performance for the period 1983-2022; 2) analyze the factors that influence income inequality in Indonesia for the period 1983-2022. The type of data used in this research is secondary data in the form of time series data from 1983-2022 (40 observations). Data were analyzed using descriptive analysis and multiple linear regression. The research results show that economic performance in terms of economic growth was best achieved by the Susilo Bambang Yudhoyono government. Meanwhile, the lowest level of income inequality was achieved by the governments of President Habibi, Abdurrahman Wahid and Megawati. The highest inflation rate occurred during the New Order era, while the government that was best at controlling inflation was the Jokowi government. The highest decline in the number of poor people occurred under the governments of Presidents Habibi, Abdurrahman Wahid and Megawati. Where the average rate of decline in the number of poor people in the 1999-2004 period was 5.21% per year. Meanwhile, the lowest rate of decline in the number of poor people in Indonesia occurred during the Jokowi government. Factors that influence income inequality in Indonesia are economic growth variables, government spending on infrastructure development, subsidized fuel prices, retail rice prices (consumer level) and government regime (dummy variable).

Keywords: change, disparity, economic inequality, poverty.

## PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan berkelanjutan selama orde baru dan orde reformasi terbukti mereduksi masalah kemiskinan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan masyarakat kelas menengah yang mapan secara ekonomi. Salah satu keberhasilan yang akan diingat dalam pemerintahan orde baru adalah pencapaian swasembada pangan, harga pangan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang masif. Namun demikian, ketimpangan tetap terjadi di masa orde baru. Di tahun terakhir orde baru berkuasa (1998), indeks gini Indonesia senilai 0,32. Kemudian Indonesia dihantam krisis ekonomi 1998 yang diikuti jatuhnya pemerintahan orde baru. Orde reformasi melanjutkan pemerintahan dengan platform kebebasan, menghadirkan keterbukaan informasi, kebebasan berserikat dan berekonomi terbukti membawa Indonesia lepas dari krisis keuangan Asia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 4,7 persen per tahun pada periode 2000 - 2022 (BPS, 2022). Nilai ini relatif cukup tinggi.

Akan tetapi, fakta dibalik adanya pertumbuhan ekonomi yang stabil, ternyata ada pula ketimpangan pendapatan di era reformasi. Ketimpangan pendapatan adalah fenomena di mana terdapat perbedaan yang signifikan dalam distribusi pendapatan antara individu, rumah tangga, atau kelompok-kelompok dalam masyarakat (Ihsan dan Rohman, 2022). Sepanjang tahun 2021, kelompok 50% terbawah (termiskin) hanya memperoleh penghasilan sebesar Rp 22,6 juta per tahun. Nilai ini sangat jauh lebih rendah dibandingkan kelompok 10% teratas (terkaya) yang berpenghasilan hingga Rp 285,07 juta per tahun (Rizaty, 2022). Menurut (BPS, 2023), ketimpangan pendapatan di Indonesia terus melebar dalam beberapa tahun terakhir. Indeks Gini yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan mencapai 0,388 pada Maret 2023. Nilai tersebut meningkat sebesar 0,007 poin dibandingkan nilai indeks gini pada September 2022 yang mencapai 0,381. Nilai indeks gini tersebut masuk kategori ketimpangan yang tinggi (Septiadi & Nursan, 2020).

Ketimpangan pendapatan memiliki dampak negatif yang luas bagi masyarakat. Ketimpangan pendapatan menyebabkan masyarakat miskin tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, sehingga kesejahteraan mereka menurun (Syawie, 2013). Selain itu, ketimpangan juga memunculkan kecemburuan sosial yang mendorong terjadinya kriminalitas di masyarakat. Ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan masyarakat miskin melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat miskin merasa tidak puas dengan kondisinya, sehingga dapat menimbulkan konflik sosial. Fenomena seperti ini tentu tidak bisa dibiarkan.

Ketimpangan distribusi pendapatan bisa terjadi dikarenakan adanya *market failure*, yang dipicu oleh *policy failure*. Dimana regulasi dan kebijakan yang disusun tidak bisa mendistribusikan alokasi sumberdaya yang dimiliki untuk pemerataan kesejahteraan rakyat. Beberapa riset banyak mengkaji tentang faktor-faktor yang diduga mempengaruhi adanya ketimpangan. Seperti riset yang dilakukan (Nursahid & Mintarti, 2018) yang mengungkapkan bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal, produktivitas tenaga kerja, investasi dan IPM.

Model ketimpangan distribusi pendapatan pada riset ini diduga dipengaruhi oleh beberapa variabel ekonomi yang mempengaruhi ketimpangan, seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, kebijakan belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, harga BBM bersubsidi dan harga beras tingkat konsumen. Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk; 1) menganalisis kinerja ekonomi Indonesia periode 1983-2022; 2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia periode 1983-2022.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif (Sugiyono, 2017). Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder dari tahun 1983-2022 (40 pengamatan). Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi *MS.Excel* dan *E-View.9*. Model penelitian yang menggambarkan determinan ketimpangan pendapatan di Indonesia adalah sebagai berikut;

$$GR_t = \beta_0 + \beta_1 GWT_t + \beta_2 GXI_t + \beta_3 POV_t + \beta_4 HBBM_t + \beta_5 HBE_t + \beta_6 Dummy + \varepsilon_t$$

Keterangan:

- $GR_t$  = Ketimpangan pendapatan di Indonesia pada periode t.  
 $GWT_t$  = Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada periode t (Persen)  
 $GXI_t$  = Pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur periode t (Rp)  
 $POV_t$  = Jumlah Penduduk Miskin Indonesia pada periode t (Jiwa)  
 $HBBM_t$  = Harga BBM bersubsidi Indonesia pada periode t (Rp/Liter)  
 $HBE_t$  = Harga beras eceran Indonesia pada periode t (Rp/Kg)  
 Dummy = 0 = Rezim orde baru, 1 = Rezim orde reformasi  
 $\beta_0$  = Konstanta  
 $\beta_1 \dots \beta_6$  = Koefisien regresi  
 $\varepsilon_t$  = galat

Tanda dan besaran parameter dugaan yang diharapkan adalah :  $\beta_3, \beta_4, \beta_5, > 0$  dan  $\beta_1, \beta_2 < 0$ .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kinerja Ekonomi Indonesia Periode 1983-2022

Kinerja ekonomi Indonesia pada hasil penelitian ini direpresentasikan melalui nilai tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan penurunan jumlah penduduk miskin.

Tabel 1. Rata-Rata Kinerja Ekonomi Indonesia Periode 1983-2022

Tahun	Rezim	Indeks Gini	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Inflasi (%)	Penurunan penduduk miskin (%)
1983-1998	Soeharto	0,34	4,46	12,53	3,3
1999-2004	Habibi-Abd.Wahid-Megawati	0,32	3,96	6,99	-5,21
2005-2014	Susilo Bambang Y.	0,38	5,80	7,59	-2,23
2015-2022	Joko Widodo	0,39	4,01	3,11	-1,18

Sumber: Data primer, diolah (2023).

Kinerja ekonomi dari aspek ketimpangan distribusi pendapatan diukur dengan indeks gini (Agusalim, 2016). Dari empat periode pemerintahan yang dibagi pada tabel 1, tingkat ketimpangan pendapatan terendah dicapai oleh pemerintahah Presiden Habibi, Abdurrahman Wahid, dan Megawati. Dimana rata-rata nilai indeks gini pada periode 1999-2004 sebesar 0,32. Sedangkan tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia paling tinggi terjadi pada Pemerintahan Jokowi, dimana rata-rata nilai indeks gini pada periode 2015-2022 sebesar 0,39. Bisa disimpulkan bahwa pemerintahan paling berhasil dalam mewujudkan pemerataan pendapatan adalah Pemerintahah Presiden Habibi, Abdurrahman Wahid, dan Megawati.

Dari aspek pencapaian pertumbuhan ekonomi, rezim pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mencapai rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi paling tinggi, dibanding rezim yang lainnya, dimana selama periode tahun 2005-2014 rata-rata pertumbuhan ekonomi

sebesar 5,8% per tahun. Sedangkan rata-rata pertumbuhan paling rendah terjadi pada pemerintahan Habibi-Abdurrahman Wahid-Megawati, dimana periode 1999-2004 rata-rata pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 3,96 persen per tahun (Tabel 1). Artinya pemerintahan paling baik dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi terjadi pada pemerintahan Presiden SBY. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Saragih, 2022) yang mengungkapkan bahwa pada rezim pemerintahan SBY, kondisi ekonomi Indonesia relatif berada pada masa cemerlang. Hal ini dilihat dari inflasi yang terjaga, pelunasan hutang pada IMF, serta turunnya kemiskinan di Indonesia yang berimbas pada pertumbuhan PDB dan lapangan pekerjaan baru.

Inflasi merupakan suatu variabel ekonomi makro yang menggambarkan tingkat kenaikan harga-harga secara umum yang terjadi di masyarakat. Tingkat inflasi tertinggi terjadi di masa orde baru yakni sebesar 12,53 %, hal ini dipicu karena tingginya nilai inflasi pada saat krisis ekonomi Asia di akhir pemerintahan orde baru tahun 1997-1998, dimana nilai inflasinya mencapai 11,1% dan 77,63 %. Sedangkan tingkat inflasi yang paling rendah terjadi di pemerintahan Jokowi, dimana rata-rata tingkat inflasi pada periode 2015-2022 sebesar 3,11% (Tabel 1). Dengan demikian pemerintahan paling baik dalam mengendalikan kestabilan harga di masyarakat terjadi pada masa pemerintahan Jokowi.

Penurunan jumlah penduduk miskin paling tinggi terjadi pada pemerintahan Presiden Habibi, Abdurrahman Wahid, dan Megawati. Dimana rata-rata tingkat penurunan jumlah penduduk miskin pada periode 1999-2004 sebesar 5,21 % per tahun. Sedangkan tingkat penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia paling rendah terjadi pada Pemerintahan Jokowi, dimana rata-rata nilai penurunan jumlah penduduk miskin pada periode 2015-2022 hanya sebesar 1,18 % per tahun, sedangkan era orde baru rata-rata tambahan penduduk miskin 3,3% per tahun (Tabel 1).

### Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia

Secara teoritis, ketimpangan pendapatan bisa dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan kebijakan pemerintah, dimana pemerintah memiliki kewenangan dan regulasi dalam mengalokasikan sumberdaya yang dimiliki suatu negara dalam mewujudkan pemerataan pendapatan. Kebijakan pemerintah dalam penelitian ini diprosikan dengan kebijakan fiskal melalui belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, variabel harga beras sebagai jenis makanan pokok masyarakat, serta harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebagai sumber energi untuk kehidupan sehari-hari. Pemerintah mempunyai kendali atas harga beras dan BBM bersubsidi. Pemerintah memiliki instrumen kebijakan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) beras di tingkat produsen, kebijakan HET (Harga Eceran Tertinggi) beras untuk kebijakan harga ditingkat konsumen. Selain itu, harga BBM bersubsidi juga atas kendali penuh pemerintah dalam menentukan harga ditingkat konsumen. Model determinan ketimpangan pendapatan pada riset ini sudah bebas dari gejala asumsi klasik.

Tabel 2. Determinan Ketimpangan Pendapatan Indonesia

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	0.284860	7.844022	0.00000
Pertumbuhan Ekonomi	0.003000	2.257284	0.0307*
Belanja Pemerintah untuk Pemb. Infrastruktur	-1.41E-10	-2.890487	0.0068*
Kemiskinan	0.000980	0.984682	0.33190
Harga BBM Subsidi	4.49E-06	1.736621	0.0918**
Harga Beras Eceran (tingkat konsumen)	1.19E-05	5.112403	0.0000*
Dummy	-0.056425	-3.802589	0.0006*
R-squared	0.824733	F-statistic	25.88065
Adjusted R-squared	0.792866	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Output E-Views (data diolah).

Berdasarkan hasil estimasi regresi, nilai R-Squared = 0.824733, artinya keragaman ketimpangan pendapatan pada penelitian ini mampu dijelaskan dengan baik oleh model penelitian sebesar 82,47%, sisanya dipengaruhi variabel lain yang ada di luar model. Berdasarkan uji pengaruh secara simultan dapat dinyatakan bahwa secara bersama-sama variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan, dimana nilai Prob(F-statistic) = 0.000000 < dari 0,05 (alpha 5%). Selain itu dapat diketahui bahwa berdasarkan uji parsial, variabel bebas yang dinyatakan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia adalah variabel pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, harga BBM bersubsidi, harga beras eceran, dan variabel dummy. Hanya variabel kemiskinan yang dinyatakan tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Penjelasannya adalah sebagai berikut.

### ***Pertumbuhan Ekonomi***

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dinyatakan memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hasil ini bisa dibuktikan melalui informasi yang disajikan Tabel 2, dimana nilai p-value variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0.0307 (lebih kecil dari alpha 0,05). Hasil ini serupa dengan hasil riset yang dikemukakan (Putri, Amar, & Aimon, 2015a); (Araja et al, 2020); (Ridho, 2023) yang menjelaskan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0.003000 (positif). Artinya kenaikan pertumbuhan ekonomi justru akan meningkatkan tingkat ketimpangan pendapatan. Hasil ini terjadi karena untuk kasus di Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang terjadi sebagian besar pertumbuhan hanya dinikmati oleh kelompok berpendapatan menengah dan kelompok atas saja. Kelompok penduduk yang ada di bawah garis kemiskinan kesulitan menikmati pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Hal ini menjawab fenomena pengentasan kemiskinan di Indonesia, bahwa untuk mengurangi penduduk miskin tidak bisa serta merta melalui kebijakan yang berorientasi pertumbuhan melalui kebijakan peningkatan produksi barang dan jasa saja, tapi juga perlu mengoptimalkan program jaring pengaman sosial dan program pemberdayaan kelompok masyarakat.

Selain itu, Upaya pengentasan kemiskinan dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan kesejahteraan nasional apabila strategi pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara simultan melalui beberapa indikator pembangunan yang relevan, seperti pertumbuhan ekonomi yang pesat, tetapi disertai pula dengan tingkat pemerataan pendapatan (Septiadi & Nursan, 2023).

### ***Belanja Pemerintah Untuk Pembangunan Infrastruktur***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur memiliki pengaruh terhadap tingkat ketimpangan pendapatan. Hal ini bisa diketahui dari nilai p-value variabel ini senilai 0.0068 (lebih kecil dari alpha 0,05). Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian (Dwiputra, 2018) yang mengemukakan bahwa belanja pemerintah memiliki pengaruh terhadap tingkat ketimpangan pendapatan. Selain itu nilai koefisien regresi sebesar -1.41E-10 (negatif). Artinya variabel belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur mempunyai hubungan yang berlawanan. Ketika pemerintah menaikkan anggaran belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, maka akan berdampak pada penurunan tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Pembangunan infrastruktur memiliki pengaruh yang kompleks terhadap ketimpangan pendapatan di suatu negara. Infrastruktur yang baik, seperti jalan raya, jembatan, bandara, dan

transportasi umum yang efisien, dapat meningkatkan aksesibilitas ke berbagai wilayah. Hal ini dapat membuka peluang baru bagi pengembangan ekonomi di daerah yang sebelumnya terpinggirkan. Sehingga akan mengurangi ketimpangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Pembangunan infrastruktur yang merata di berbagai wilayah dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan pembentukan pusat-pusat ekonomi baru. Namun, jika pembangunan infrastruktur lebih difokuskan di daerah-daerah tertentu saja, hal ini dapat meningkatkan ketimpangan antara daerah yang terkoneksi dengan infrastruktur yang baik dan daerah yang tidak mendapatkan akses yang sama. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang merata untuk akses air bersih, listrik, dan layanan kesehatan serta pendidikan dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi.

### ***Kemiskinan***

Pada penelitian ini, variabel kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dimana *p-value* variabel kemiskinan sebesar  $0.33190 > 0,05$  (taraf alpha 5%). Hasil serupa juga dikemukakan (Sarina, 2019) dalam penelitiannya yang menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan tidak berpengaruh nyata pada ketimpangan distribusi pendapatan. Serta tidak berpengaruh pula terhadap kesejahteraan (Mulia dan Saputra, 2020). Artinya, untuk mengurangi ketimpangan jangan berfokus pada jumlah orang-orang yang sudah masuk kategori miskin, tetapi berfokuslah pada peningkatan skill sumberdaya manusia dan pemenuhan aspek kebutuhan dasar masyarakat secara umum, seperti peningkatan akses terhadap kebutuhan gizi, pendidikan yang layak dan layanan kesehatan yang setara. Artinya orientasi pengurangan ketimpangan pendapatan bisa dengan berfokus pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (Putri, Amar, & Aimon, 2015b); (Amali & Syafri, 2023).

### ***Harga BBM Bersubsidi***

Harga BBM Bersubsidi merupakan salah satu variabel ekonomi yang penting dalam perekonomian Indonesia. Beberapa pemerintahan seringkali melakukan rencana kenaikan harga BBM dan selalu menuai protes dan penolakan dari masyarakat. Hal ini dikarenakan kenaikan harga BBM akan diikuti kenaikan harga barang/jasa lainnya, sehingga berimplikasi pada peningkatan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Temuan riset ini dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh positif antara harga BBM bersubsidi terhadap ketimpangan pendapatan pada taraf nyata 10 persen ( $p\text{-value}: 0.0918 < 0,10$ ). Artinya kenaikan harga BBM akan berdampak pada peningkatan ketimpangan pendapatan. Temuan ini didukung dengan pendapat (Miftahorrozi et al., 2022) yang mendeskripsikan bahwa harga BBM yang lebih tinggi akan mempunyai banyak implikasi, termasuk tekanan defisit fiskal, alokasi anggaran, inflasi, stabilitas makroekonomi, dan kemiskinan.

Kenaikan harga BBM dapat menyebabkan naiknya biaya transportasi dan biaya hidup secara umum. Kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah cenderung merasakan dampak ini secara lebih berat karena mereka harus mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka untuk kebutuhan dasar, termasuk biaya transportasi. Di sisi lain, kelompok dengan pendapatan lebih tinggi mungkin lebih fleksibel dalam menanggung kenaikan harga ini. Selain itu, kenaikan harga BBM dapat memengaruhi biaya operasional usaha kecil dan mikro, terutama yang bergantung pada transportasi untuk distribusi barang mereka. Bisnis-bisnis kecil yang tidak mampu menanggung kenaikan biaya ini mungkin terpaksa menaikkan harga produk mereka, yang pada akhirnya dapat memengaruhi daya beli konsumen dari berbagai kalangan, terutama mereka yang memiliki pendapatan rendah.

### ***Harga Beras Eceran (tingkat konsumen)***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga beras eceran (tingkat konsumen) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dengan tanda positif. Artinya

kenaikan harga beras eceran akan meningkatkan nilai indeks gini yang artinya ketimpangan juga akan meningkat. Kenaikan harga beras dapat menjadi beban tambahan pada kelompok pendapatan rendah, karena beras seringkali menjadi bagian penting dari pola konsumsi mereka. Kelompok ini cenderung menggunakan proporsi yang lebih besar dari pendapatan mereka untuk membeli beras dan bahan makanan pokok lainnya. Perubahan harga pada komoditas pangan dapat memengaruhi tingkat inflasi.

Pengendalian harga pada komoditas pangan dianggap penting karena dengan semakin mahalnya harga maka dapat menciptakan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat, sehingga memaksa masyarakat untuk mengalokasikan sebagian besar pendapatan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan harga beras juga dapat berdampak pada gizi dan kesehatan masyarakat, terutama kelompok yang mengandalkan beras sebagai sumber utama karbohidrat. Kelompok dengan pendapatan rendah mungkin terpaksa mengurangi asupan beras atau menggantinya dengan bahan makanan yang lebih murah, yang pada akhirnya dapat memengaruhi status gizi mereka. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Septiadi, Harianto, & Suharno, 2016) yang menjelaskan bahwa penurunan harga beras sangat efektif menurunkan jumlah penduduk miskin di pedesaan maupun di perkotaan, yang berimplikasi akan mengurangi ketimpangan antara kelompok masyarakat, baik di wilayah perkotaan, maupun pedesaan.

#### ***Rezim Pemerintahan (Dummy)***

Rezim pemerintahan dalam penelitian ini merupakan variabel dummy. Hasil penelitian menunjukkan tanda negatif, dan dinyatakan sebagai variabel yang berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Dibuktikan dengan nilai *p-value* pada variabel rezim pemerintahan sebesar 0,0006 ( $<$  taraf alpha 0,05). Artinya setiap perubahan rezim pemerintahan berdampak nyata terhadap ketimpangan pendapatan. Nilai koefisien regresi variabel rezim pemerintahan memiliki tanda negatif sebesar -0,056425, yang menunjukkan bahwa baik secara statistik maupun perhitungan manual dapat diamati bahwa tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi pada rezim orde baru lebih kecil (0,3365) dibandingkan dengan rata-rata tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi di orde reformasi (0,3659). Dengan demikian distribusi pendapatan masyarakat di masa pemerintahan orde baru lebih merata dibandingkan dengan pemerintahan orde reformasi.

Hasil ini sejalan dengan hasil riset (Maruf, 2023) yang mengungkapkan ketimpangan ekonomi pada tahun 2023 antara si kaya dan miskin menggunakan data uang simpanan di bank sungguh mencengangkan. Rupanya, sebanyak Rp 4.231 triliun atau sekitar 53% dari total dana yang berada di perbankan yang mencapai Rp 8.049 triliun itu hanya dimiliki oleh 0,02% populasi penduduk Indonesia. Kalau dijumlahkan hanya beberapa orang kaya saja di kelompok populasi itu, tepatnya adalah terdapat sekitar 54 ribu orang penduduk Indonesia memiliki 53% dari total dana yang berada di perbankan Indonesia. Hasil riset serupa diungkapkan (Rizaty, 2022), dimana pada tahun 2021 jika dilihat dari proporsinya, kelompok 50% terbawah (termiskin) hanya menerima 12,4% *kue ekonomi* yang dihasilkan dari pendapatan nasional. Sementara itu, 10% penduduk teratas (terkaya) dapat menguasai 48% pendapatan nasional pada tahun 2021. Artinya meski di era orde reformasi mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang baik, tapi ketimpangan tetap tinggi, karena peningkatan perputaran ekonomi sebagian besar dinikmati oleh kelompok teratas saja.

Pada masa orde baru, konsep pembangunan menerapkan konsep *trickle down effect* (efek penetesan ke bawah) yang diinisiasi Presiden Soeharto (Piliang, 2023). Konsep *trickle-down effect* merupakan teori ekonomi yang menyatakan bahwa kebijakan atau pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat pada kelompok kaya atau industri besar akan secara bertahap mengalir ke lapisan masyarakat yang lebih rendah secara otomatis. Dalam teori ini,

pertumbuhan ekonomi dari kelompok atas diharapkan akan menghasilkan lapangan kerja, investasi, dan kesempatan ekonomi yang pada akhirnya akan menguntungkan semua lapisan masyarakat (pemerataan). Namun demikian, dalam praktiknya, *trickle-down effect* seringkali dipertanyakan karena ada juga bukti yang menunjukkan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi tidak selalu merata dan tidak secara otomatis mengalir ke seluruh lapisan masyarakat (Elizabeth, 2007).

## KESIMPULAN

Kinerja ekonomi dari aspek pertumbuhan ekonomi paling baik dicapai oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan tingkat ketimpangan pendapatan terendah dicapai oleh pemerintahan Presiden Habibi, Abdurrahman Wahid, dan Megawati. Tingkat inflasi tertinggi terjadi di masa orde baru, sedangkan pemerintahan paling baik dalam mengendalikan inflasi adalah pemerintahan Jokowi. Penurunan jumlah penduduk miskin paling tinggi terjadi pada pemerintahan Presiden Habibi, Abdurrahman Wahid, dan Megawati. Dimana rata-rata tingkat penurunan jumlah penduduk miskin pada periode 1999-2004 sebesar 5,21 % per tahun. Sedangkan tingkat penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia paling rendah terjadi pada Pemerintahan Jokowi. Faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia adalah variabel pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, harga BBM bersubsidi, harga beras eceran (tingkat konsumen) dan rezim pemerintahan (variabel dummy).

## DAFTAR PUSTAKA

- Agusalim, L. (2016). Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan desentralisasi di Indonesia. *Kinerja*, 20(1), 53-68.
- Amali, F. ., & Syafri. (2023). Analisis Ketimpangan Pendapatan Pada 33 Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 815–820.
- Araja, F. H., Sasana, H., & Jalunggono, G. (2020). Analisis Tingkat Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Bekasi (Analysis Of Income Level In Bekasi District 1). *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 2(3), 685–699.
- BPS. (2023). Berita Resmi Statistik: Gini Ratio Maret 2023 tercatat sebesar 0,388. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2035/gini-ratio-maret-2023-tercatat-sebesar-0-388-.html>
- Dwiputra, R. M. (2018). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Periode 2011-2016*. [Skripsi]. Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya.
- Elizabeth, R. (2007). Fenomena Sosiologis Metamorphosis Petani: Ke Arah Keberpihakan Pada Masyarakat Petani di Pedesaan yang Terpinggirkan Terkait Konsep Ekonomi Kerakyatan. In *Forum Penelitian Agro Ekonomi* (Vol. 25, No. 1, pp. 29-42).
- Ihsani, S. F., & Rohman, M. F. (2022). Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia: Kasus Kebijakan Sentralisasi, Desentralisasi, dan Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 12(1), 1-22.
- Maruf, M. (2023). *Separuh Lebih Uang Di Bank Dikuasai Oleh Hanya 0,02% Penduduk*. CNBC Indonesia; CNBC Indonesia Research. [online]. Author: Muhammad Maruf, dapat diakses di; <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230802090004-128-459410/separuh-lebih-uang-di-bank-dikuasai-oleh-hanya-002-penduduk>

- Miftahorrozi, M., Septiadi, D., Ratri, F. F. A. P., Ruswaji, M. L., Susanti, M. R. I., Fitriani, Y. S. D. A., & PT, B. P. (2022). *Pengantar Ilmu Perekonomian, Investasi, dan Keuangan*. Get Press Publisher: Kota Padang.
- Mulia, R. A., & Saputra, N. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Kota Padang. *Jurnal El-Riyasah*, 11(1), 67-83.
- Nursahid, E., & Mintarti, S. (2018). Analisis faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)*, 3(1). Retrieved from <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIEM>
- Piliang, M. Z. (2023). Pengelolaan Ekonomi Indonesia: Pengalaman Orde Baru. *At-Tanmiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1), 207-238.
- Putri, Y. E., Amar, S., & Aimon, H. (2015a). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 3(6), 1–18.
- Putri, Y. E., Amar, S., & Aimon, H. (2015b). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 3(6), 102918.
- Ridho, M. A. M. (2023). *Analisis pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil pajak, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Rizaty, M.A. (2022). *Belunggu Ketimpangan di Balik Membesarnya Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Data Indonesia. Author: Monavia Ayu Rizaty. Klik selengkapnya di sini: <https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/belunggu-ketimpangan-di-balik-membesarnya-ekonomi-indonesia>.
- Saragih, F. (2022). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada Masa Covid-19: Adam Smith. *Journal Economic Education, Business and Accounting (JEEBA)*, 1(1), 24-31.
- Sarina. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2017*. In Skripsi, Makassar: Universitas Islam Negeri Alaluddin Makssar.
- Septiadi, D., & Nursan, M. (2020). Pengentasan Kemiskinan Indonesia: Analisis Indikator Makroekonomi Dan Kebijakan Pertanian. *Jurnal Hexagro*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.36423/hexagro.v4i1.371>
- Septiadi, D., & Nursan, M. (2023). Simulasi kebijakan pertanian terhadap pengentasan kemiskinan di indonesia. *Agrimansion*, 24(1), 75–85.
- Septiadi, D., Harianto, H., & Suharno, S. (2016). Dampak Kebijakan Harga Beras dan Luas Areal Irigasi Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 4(2), 91–106. <https://doi.org/10.29244/jai.2016.4.2.91-106>
- Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syawie, M. (2013). Ketimpangan Pendapatan dan Penurunan Kesejahteraan Masyarakat. *Informasi*, 95.